

PERANAN PENGELUARAN PEMERINTAH SEKTOR PENDIDIKAN, KESEHATAN, TRANSPORTASI, DAN PERUMAHAN BAGI PEREKONOMIAN INDONESIA

Raynal Yasni¹⁾, Fuad Iqbal Muhammad²⁾

¹⁾ Jurusan Akuntansi, Politeknik Keuangan Negara STAN

²⁾ Direktorat Jenderal Pajak, Kementerian Keuangan

Email: raynalyasni@pknstan.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Data dalam penelitian ini merupakan data sekunder dan diproses dengan menggunakan Error Correction Models (ECM). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dalam jangka panjang: (1) pengeluaran pemerintah dalam sektor pendidikan, transportasi, dan perumahan memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, (2) sedangkan pengeluaran pemerintah dalam sektor kesehatan memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Kata Kunci: pengeluaran pemerintah, pertumbuhan ekonomi

Abstract

The purpose of this research is to examine the influence of government expenditure on education, health, transportation and housing and its implication to economics growth in Indonesia. The data is secondary data and processed using error correction model (ECM). The results of this research show that in long term: (1) government expenditure on education, transportation, and housing has positive and significant effect on economic growth, (2) government expenditure on health doesn't have significant effect on economic growth.

Keywords: government expenditure, economic growth

1. PENDAHULUAN

Pertumbuhan ekonomi Indonesia pada tahun 2012 sempat menyentuh 6,23%. Angka ini terus turun, bahkan saat terjadi pergantian kepemimpinan di tahun 2014 dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono ke Presiden Joko Widodo, pertumbuhan ekonomi berada pada angka 5,01%, hingga pada tahun 2016 pertumbuhan ekonomi hanya tumbuh sebesar 5,02%. Pertumbuhan ekonomi Indonesia yang fluktuatif tersebut tidak terlepas dari daya dukung ekonomi yang oleh Sukirno (2006: 429) mencakup tanah dan kekayaan alam lainnya, jumlah dan mutu dari penduduk dan tenaga kerja, barang-barang modal dan tingkat teknologi, serta sistem sosial dan sikap dari masyarakat.

Kualitas manusia berperan besar bagi pertumbuhan ekonomi melalui kapabilitas

penduduk dan kebebasan yang akan meningkatkan kapasitas produksi (Ranis, 2004). Mutu penduduk tersebut dapat diwakili dengan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) yang meliputi tiga dimensi dasar, yaitu panjangnya usia dan kesehatan, pengetahuan, serta standar hidup layak. Pemerintah sendiri telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan indeks pembangunan manusia melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang pro terhadap IPM. Hal ini dapat dilihat dari peningkatan anggaran untuk pendidikan sebesar minimal 20% dari total APBN (Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional) dan peningkatan anggaran sektor kesehatan sebesar 5% dari total APBN.

Selain kebijakan APBN yang fokus dalam peningkatan pembangunan manusia, pemerintah juga gencar dalam melakukan pembangunan fisik, terutama pembangunan sektor transportasi

dan perumahan untuk meningkatkan daya saing, produktifitas dan kemandirian ekonomi. Terlebih sejak Presiden Joko Widodo berkuasa, pemerintah makin menggalakkan pembangunan jalan sepanjang 836 kilometer, pembangunan jembatan sepanjang 10.198 meter, melanjutkan dan membangun bandara baru sebanyak 13 bandara, membangun dan mengembangkan pelabuhan laut sebanyak 61 lokasi, pembangunan tahap 1 dan lanjutan jalur kereta api sepanjang 710 kilometer, dan melanjutkan pembangunan terminal penumpang sebanyak tiga lokasi berdasarkan arah APBN 2017.

APBN sebagai instrumen fiskal yang tersedia bagi pemerintah memiliki peran dalam

mendukung pertumbuhan ekonomi nasional melalui realisasi belanja APBN. Peran akuntansi belanja yang dilakukan pemerintah pada fungsi yang meningkatkan kualitas sumber daya manusia seperti pendidikan, kesehatan, dan perumahan serta infrastruktur yang mendukung konektifitas kegiatan ekonomi tidaklah sedikit dan dinilai memiliki kontribusi besar menciptakan dan mendukung kesinambungan pertumbuhan ekonomi. Tabel 1 berikut memberikan gambaran realisasi belanja netto APBN untuk beberapa fungsi termasuk fungsi kesehatan, pendidikan, perumahan dan fasilitas umum.

Tabel 1
Perkembangan Realisasi Belanja Netto APBN 2014-2016 (Miliar Rupiah)

Fungsi/ Subfungsi	2014	2015	2016
Pelayanan Umum	797.763,6	624.497,7	322.588,1
Pertahanan	86.113,3	105.907,3	109.003,9
Ketertiban dan Keamanan	34.856,6	52.941,3	122.930,5
Ekonomi	97.140,8	177.105,2	331.005,0
Lingkungan Hidup	9.326,4	9.874,5	11.007,2
Perumahan dan Fasilitas Umum	26.244,3	16.981,1	34.340,7
Kesehatan	10.893,4	23.225,7	66.069,8
Pariwisata dan Budaya	1.469,0	3.166,3	5.868,6
Agama	4.001,9	5.097,9	9.778,4
Pendidikan	122.697,0	143.638,7	143.262,1
Perlindungan Sosial	13.070,8	20.867,8	150.841,7

Sumber: Lampiran Nota Keuangan dan APBN Tahun 2017, hal. 4.

Berdasarkan uraian tersebut, penulis melihat terdapat urgensi untuk menunjukkan dalam penelitian ini, apakah pengeluaran pemerintah Indonesia terutama dalam sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan telah sesuai dengan tujuannya dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan transportasi dan perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi, Indonesia pada kurun waktu 1987-2016. Pemilihan rentang waktu dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2016 dikarenakan pada tahun tersebut pemerintah memulai reformasi kebijakan dalam perekonomian, dikarenakan berakhirnya era *oil boom* yang membuat penerimaan negara dari sektor minyak dan gas turun.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berkontribusi positif bagi sisi akademis dan kebijakan publik. Pertama, bagi pemerintah

penelitian ini diharapkan menjadi pedoman mengenai pentingnya pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi dan menunjukkan seberapa besar pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kedua, para akademisi dan para peneliti diharapkan dapat terus memperluas penggunaan variabel akuntansi belanja pemerintah ini dalam kaitannya terhadap pertumbuhan ekonomi.

2. TELAAH LITERATUR DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a. Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi menurut Todaro dan Smith (2006: 22) dapat diukur dari peningkatan pendapatan rumah tangga atau pendapatan per

kapita. Anand dan Sen (2000: 2032) menunjuk bahwa pertumbuhan ekonomi dapat menciptakan sumber daya untuk meningkatkan layanan publik.

Terdapat banyak pandangan mengenai pertumbuhan ekonomi, mulai dari pandangan klasik (Adam Smith, David Ricardo, Thomas Robert Malthus dan John Stuart Mill), maupun pandangan ekonom neoklasik (Robert Sollow dan Trevor Swan). Selanjutnya, kita juga mengenal Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar yang menunjukkan bahwa investasi mempunyai pengaruh yang signifikan dalam pertumbuhan ekonomi. Dalam teori ini disebutkan bahwa tumbuhnya perekonomian perlu didukung dengan tingkat tabungan dan investasi tertentu.

Berikutnya, kita mengenal teori pertumbuhan ekonomi Solow-Swan yang menjelaskan bahwa investasi, tabungan, pertumbuhan penduduk, serta teknologi berpengaruh terhadap tingkat perekonomian dan pertumbuhan ekonominya. Di sisi lain, teori Schumpter menekankan pentingnya pertumbuhan ekonomi didorong oleh banyaknya wirausaha dan mereka merupakan golongan yang akan terus menerus membuat pembaruan atau inovasi dalam ekonomi. Berikutnya, ada juga Prof. W.W. Rostow yang memperkenalkan Teori Tahap-Tahap Pertumbuhan Ekonomi yang memberikan lima tahap dalam pertumbuhan ekonomi dan setiap negara-negara di dunia dapat digolongkan ke dalam salah satu dari kelima tahap pertumbuhan ekonomi yang dijelaskannya.

b. Pengeluaran Pemerintah

Banyak teori yang menghubungkan pengeluaran pemerintah dengan pertumbuhan ekonomi, di antaranya yaitu:

1) Teori Rostow dan Musgrave

Model ini menghubungkan antara besarnya perkembangan pengeluaran pemerintah dengan tahapan pembangunan ekonomi suatu negara, yaitu tahap awal, tahap menengah, dan tahap lanjut. Pada tahap awal, rasio pengeluaran pemerintah terhadap pendapatan nasional relatif besar. Hal ini dikarenakan pada tahap ini pemerintah harus menyediakan berbagai sarana dan prasarana seperti pendidikan, kesehatan, prasarana transportasi dan sebagainya. (Dumairy, 1997: 20).

2) Teori Adolf Wagner

Teori Adolf Wagner didasarkan pada pengamatan empiris terhadap negara-negara Eropa, Amerika Serikat, dan Jepang pada abad ke-19 yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah dan kegiatan pemerintah cenderung semakin meningkat dari tahun ke tahun. Wagner mengukur perbandingan pengeluaran pemerintah terhadap PDB dengan mengemukakan suatu teori mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah yang semakin besar dipengaruhi dari kenaikan terhadap PDB (Dumairy, 1997: 25).

3) Teori Mikro Pengeluaran Pemerintah

Teori mikro membahas mengenai perkembangan pengeluaran pemerintah dengan menganalisis faktor-faktor yang menimbulkan permintaan akan barang publik dan faktor-faktor yang mempengaruhi tersedianya barang publik. Hubungan antara permintaan dan penawaran akan barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja pemerintah. Jumlah barang publik yang akan disediakan tersebut, selanjutnya akan menimbulkan permintaan akan barang lain. Misalnya, pengeluaran infrastruktur akan mempengaruhi permintaan akan bahan-bahan baku dalam membangun infrastruktur.

c. Hubungan Pengeluaran Belanja Pemerintah Sektor Pendidikan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pendidikan merupakan bentuk investasi sumber daya manusia dalam jangka panjang. Menurut Todaro (1997: 467), pendidikan yang kurang memadai dan tidak dikembangkan secara terus menerus tentu akan membuat suatu bangsa tidak siap bersaing dengan bangsa-bangsa lainnya. Walaupun sulit dicatat dalam dokumen statistik, perluasan kesempatan bersekolah dalam segala tingkat telah mendorong pertumbuhan ekonomi secara agresif melalui

- 1) Terciptanya angkatan kerja yang lebih produktif karena pengetahuan dan bekal keterampilan yang lebih baik.
- 2) Tersedianya kesempatan kerja yang lebih luas.
- 3) Terciptanya kelompok pimpinan yang terdidik untuk mengisi lowongan di suatu unit usaha atau lembaga.
- 4) Terciptanya berbagai program pendidikan dan pelatihan untuk membina sikap-sikap modern.

Dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional Pasal 49 ayat (1) disebutkan bahwa dana pendidikan selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) pada sektor pendidikan dan minimal 20% dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Hal ini menunjukkan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam mendukung perekonomian.

d. Hubungan Pengeluaran Belanja Pemerintah Sektor Kesehatan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Kesehatan adalah kebutuhan mendasar bagi manusia. Manusia tidak akan dapat beraktivitas dengan baik jika mengalami gangguan kesehatan. Menurut Mills dan Gilson (1990: 35) kesehatan merupakan suatu kebutuhan (*need*) yang diartikan secara umum yang merupakan perbandingan antara situasi nyata dan standar teknis tertentu yang telah disepakati. Selain itu juga, kesehatan merupakan kebutuhan yang dirasakan (*felt need*) yaitu kebutuhan yang dirasakan sendiri oleh individu. Sehingga, keputusan untuk memanfaatkan suatu pelayanan kesehatan merupakan pencerminan kombinasi normatif dan kebutuhan yang dirasakan.

Kesehatan merupakan kebutuhan pokok dimana tanpa kesehatan masyarakat tidak dapat bekerja dan akan berpengaruh pada produktifitas secara agregat. Sebagai negara dalam tahap perkembangan menengah, maka pengeluaran negara dalam bidang kesehatan masih sangat diperlukan di Indonesia, meskipun dewasa ini pelayanan kesehatan yang disediakan swasta semakin banyak. Pengeluaran ini utamanya untuk menyediakan layanan kesehatan yang murah bagi masyarakat berpenghasilan rendah (MBR), sehingga seluruh lapisan masyarakat dapat memperoleh layanan kesehatan sebagaimana mestinya.

Pengeluaran di bidang kesehatan ini semakin diperhatikan dengan adanya Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Pasal 171 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal 5% (lima persen) dari APBN di luar gaji, sementara besar anggaran kesehatan pemerintah daerah provinsi dan Kabupaten/Kota dialokasikan minimal 10% (sepuluh persen) dari APBD di luar gaji. Alokasi anggaran kesehatan tersebut diprioritaskan untuk kepentingan

pelayanan publik sekurang-kurangnya 2/3 (dua pertiga) dari anggaran kesehatan dalam APBN dan APBD.

e. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Transportasi Dengan Pertumbuhan Ekonomi

Pembangunan ekonomi membutuhkan jasa transportasi yang cukup serta memadai. Transportasi merupakan sarana dalam memindahkan orang maupun barang, dimana pemindahan orang maupun barang diharapkan akan bertemunya antara hasil produksi dengan konsumen yang membutuhkan. Transportasi yang tepat akan menurunkan biaya produksi sehingga harga jual produk juga akan turun sehingga membuat ekonomi berjalan efisien.

Hubungan transportasi dan pertumbuhan ekonomi ini telah banyak. Penelitian yang dilakukan oleh Silaban (2002: 20) menggunakan PDRB sebagai variabel terikat yang hasilnya adalah panjang jalan, jumlah kendaraan bermotor dan pajak kendaraan bermotor mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Adapun penelitian yang dilakukan oleh Fahruky (2005:15) menggunakan PDRB pada sektor transportasi dan telekomunikasi sebagai variabel terikat, panjang jalan dan jumlah pengguna telepon Telkom sebagai variabel bebas. Hasilnya adalah panjang jalan dan jumlah pelanggan telepon Telkom berpengaruh nyata atau signifikan terhadap PDRB sektor transportasi dan telekomunikasi Sumatera Utara.

f. Hubungan Pengeluaran Pemerintah Sektor Perumahan dengan Pertumbuhan Ekonomi

Sektor perumahan diyakini pemerintah merupakan salah satu sektor yang bisa menggenjot pertumbuhan ekonomi. Adanya keterkaitan sektor ini terhadap 174 industri terkait akan berdampak besar bagi Bergeraknya ekonomi masyarakat. Banyak stimulus pemerintah berikan bagi sektor perumahan khususnya rumah subsidi untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR).

g. Hasil Penelitian Sebelumnya

Diakui terdapat banyak penelitian yang membahas mengenai hubungan antara pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi di suatu Negara. Namun

demikian, terdapat variasi beragam terkait unsur infrastruktur yang digunakan. Berikut ini adalah beberapa ringkasan penelitian terdahulu, antara lain:

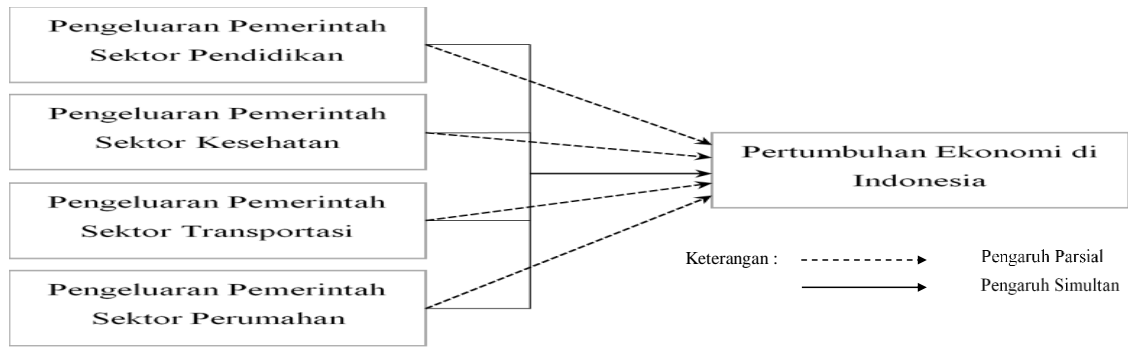
- 1) Bastias (2010) menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia periode 1969-2009. Model analisis yang digunakan adalah *Error Correction Model* (ECM) yang mampu menjelaskan perilaku jangka pendek dan jangka panjang atas pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Model ECM mampu meliputi banyak variabel dalam menganalisa fenomena ekonomi jangka panjang serta mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Hasil penelitian ini menunjukkan hasil sebagai berikut:
 - a) Dalam jangka pendek hanya variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi yang berpengaruh positif secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.
 - b) Pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, dan perumahan tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
 - c) Dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan dan transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dan bertanda positif, sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.
- 2) Odhiambo (2015) meneliti mengenai pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi di Afrika Selatan. Metode yang digunakan adalah dengan *developed autoregressive distributed lag model* (ARDL) disebabkan peneliti ingin membuktikan dua pandangan berbeda sekaligus dalam hubungan pengeluaran dan pertumbuhan tersebut. Di satu sisi pengeluaran pemerintah mendorong pertumbuhan ekonomi (Keynesian). Di sisi lain, pertumbuhan

ekonomi yang tinggi mendorong naiknya belanja pemerintah menurut hukum Wagner. Hasil penelitiannya menunjukkan, bahwa dalam jangka pendek terjadi hubungan saling mempengaruhi antara pengeluaran pemerintah dan pertumbuhan ekonomi.

- 3) Donald N. Shuanglin (1993) menganalisis mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah pada sektor pendidikan, kesejahteraan dan pertahanan terhadap pertumbuhan ekonomi pada 47 negara dalam 10 tahun dan 58 negara dalam 11 tahun. Hasil penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran pendidikan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi sedangkan pengeluaran sektor kesejahteraan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, dan pengeluaran sektor kesehatan berpengaruh positif terhadap beberapa negara tetapi tidak signifikan pada negara lainnya.
- 4) Suleiman Abu Bader dan Aamer (2003) menganalisis tentang pengaruh pengeluaran pemerintah dan pengeluaran militer terhadap pertumbuhan ekonomi studi kasus pada Mesir, Israel dan Suriah. Penelitian ini menggunakan metode Standar Granger Causality dan *error correction model* (ECM). Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa pengeluaran militer berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi dan pengeluaran sipil untuk Israel dan Mesir memiliki pengaruh positif.

h. Kerangka Pemikiran

Berdasarkan teori-teori di atas dan hasil penelitian sebelumnya dapat dibangun kerangka pemikiran penelitian ini. Kerangka penelitian ini menggunakan replikasi dari penelitian Bastias (2010) dengan menggunakan angka tahun yang lebih baru serta pemisahan variabel pengeluaran infrastruktur menjadi 2, yaitu sektor transportasi dan perumahan. Selain itu, penggunaan data realisasi belanja pemerintah menjadi penekanan penting pada penelitian ini untuk menunjukkan pentingnya peran akuntansi belanja yang handal bagi pertumbuhan perekonomian. Adapun kerangka pemikiran dalam penelitian ini dapat dilihat dalam gambar 1.



Sumber: Diolah dari berbagai sumber (2017)

Gambar 1
Kerangka Pemikiran

i. Hipotesis Penelitian

Berdasarkan telaah teoritis, penelitian-penelitian sebelumnya, serta kerangka pemikiran, penulis mengembangkan beberapa hipotesis sebagai berikut:

Hipotesis 1

H0 = Diduga tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha = Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara parsial dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hipotesis 2

H0 = Diduga tidak terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

Ha = Diduga terdapat pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan secara simultan dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi

3. METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, data yang diambil berupa data sekunder yang diperoleh dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat yang

diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan, dari laporan-laporan, buku-buku, dokumen-dokumen yang diterbitkan oleh Badan Pusat Statistik maupun dari sumber-sumber lainnya yang dianggap sesuai dengan penelitian yang dilakukan. Data yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan data *time-series* atau data runtun waktu. Adapun data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data pertumbuhan ekonomi Indonesia tahun 1987-2016 dan data pengeluaran pemerintah (realisasi belanja) sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan tahun 1987-2016.

Dalam penelitian ini variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan dan variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi dijadikan variabel independen tersendiri meskipun dalam Bastias (2010) kedua variabel ini dijadikan satu menjadi variabel infrastruktur. Pemisahan ini karena dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2015-2019 dinyatakan bahwa arah kebijakan nasional salah satunya yaitu meningkatkan akses masyarakat berpendapatan rendah terhadap hunian yang layak, aman dan terjangkau serta didukung oleh penyediaan prasarana, sarana dan utilitas yang memadai. Kebijakan tersebut membuat alokasi anggaran sektor perumahan menjadi sektor yang diprioritaskan dalam penentuan kebijakan pembangunan pemerintah.

a) Variabel Penelitian dan Definisi Operasional Variabel, dan Cara Pengukuran

Terdapat empat variabel bebas dan satu variable terikat dalam penelitian ini yaitu:

- 1) Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan

Variabel pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan yaitu pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk sektor Pendidikan, meliputi baik belanja rutin, belanja modal maupun bantuan proyek dan teknis. Pengukuran dilakukan dengan data sekunder pengeluaran pemerintah sektor Pendidikan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Nota Keuangan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

2) Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan

Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan yaitu pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk sektor kesehatan, meliputi baik belanja rutin, belanja modal maupun bantuan proyek dan teknis. Pengukuran dilakukan dengan data sekunder pengeluaran pemerintah sektor Kesehatan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Nota Keuangan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

3) Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Transportasi

Variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi yaitu pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk sektor transportasi, meliputi baik belanja rutin, belanja modal maupun bantuan proyek dan teknis. Pengukuran dilakukan dengan data sekunder pengeluaran pemerintah sektor transportasi dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Nota Keuangan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

4) Variabel Pengeluaran Pemerintah Sektor Perumahan

Variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan yaitu pengeluaran pemerintah yang ditujukan untuk sektor Pendidikan, meliputi baik belanja rutin, belanja modal maupun bantuan proyek dan teknis. Pengukuran dilakukan dengan data sekunder pengeluaran pemerintah sektor Perumahan dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat dan Nota Keuangan yang diperoleh dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan.

5) Variabel Terikat

Variabel terikat penelitian ini adalah Produk Domestik Bruto Indonesia. Variabel ini dinyatakan dalam nilai PDB Indonesia dalam Rupiah yang diperoleh dari data Badan Pusat Statistik.

b) Teknik Analisis Data

Dalam analisis ilmu sosial, seringkali diamati bahwa suatu variabel terikat memiliki ketergantungan pada variabel bebasnya tidak hanya bersifat seketika. Sering terjadi, suatu variabel bereaksi terhadap variabel lain dengan suatu selang waktu atau *lag*. Misalnya, pengeluaran pemerintah berupa investasi tidak dapat seketika mempengaruhi output. Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah berupa konsumsi dan pengeluaran yang bersifat investasi cenderung sama dimana akan habis dibelanjakan sehingga tidak berpengaruh terhadap output. Namun demikian, dalam jangka panjang investasi pemerintah memiliki pengaruh terhadap peningkatan output. Hal ini dikarenakan adanya *lag* di dalamnya.

Adapun teknik analisis data yang digunakan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian ini adalah analisis data *time series*. Pengolahan data dilakukan dengan bantuan program Eviews 8.

1) ECM (*Error Correction Model*)

ECM digunakan untuk mengetahui pengaruh variabel bebas terhadap variabel terikat dalam jangka pendek dan penyesuaiannya yang cepat untuk kembali ke keseimbangan jangka panjangnya terhadap data *time series* untuk variabel-variabel yang memiliki kointegrasi. Pemodelan ECM merupakan salah satu cara untuk mengidentifikasi hubungan di antara variabel yang bersifat *nonstationary*. Dengan syarat bahwa pada sekelompok variabel *nonstationary* terdapat suatu kointegrasi, maka pemodelan ECM dinyatakan valid. Syarat ini dinyatakan dalam teorema representasi Engle-Granger (Ariefianto, 2012: 142).

Adapun pertimbangan penggunaan alat analisis ECM karena dianggap mampu menyeimbangkan hubungan ekonomi jangka pendek variabel-variabel yang telah memiliki keseimbangan/hubungan ekonomi jangka panjang serta mampu mengkaji konsistensi model empiris dengan teori ekonomi. Secara matematis model dasar yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

$$Y = f(P_t, K_t, T_t, R_t) \quad (1)$$

Berdasarkan model matematis di atas, persamaan model jangka panjang dapat dituliskan sebagai berikut:

$$Y_t = \alpha_0 + \alpha_1 P_t + \alpha_2 K_t + \alpha_3 T_t + \alpha_4 R_t + \varepsilon_t \quad (2)$$

Dimana:

- P = pengeluaran pemerintah sektor pendidikan per tahun
 K_t = pengeluaran pemerintah sektor kesehatan per tahun
 T_t = pengeluaran pemerintah sektor transportasi per tahun
 Y = pengeluaran pemerintah sektor perumahan per tahun
 ε_t = tingkat pertumbuhan ekonomi
 = *error term*

Sedangkan persamaan model jangka pendeknya dapat dilihat sebagai berikut pada persamaan 3:

$$D(Y_t) = \alpha_0 + \alpha_1 D(P_t) + \alpha_2 D(K_t) + \alpha_3 D(T_t) + \alpha_4 D(R_t) + \alpha_5 ECT \quad (3)$$

Dimana:

- $D(P_t)$ = pengeluaran pemerintah sektor pendidikan per tahun yang didiferensiasi pada orde pertama
 $D(K_t)$ = kesehatan per tahun yang didiferensiasi pada orde pertama
 $D(T_t)$ = pengeluaran pemerintah sektor transportasi per tahun yang didiferensiasi pada orde pertama
 $D(R_t)$ = pengeluaran pemerintah sektor perumahan per tahun yang didiferensiasi pada orde pertama
 $D(Y)$ = tingkat pertumbuhan ekonomi yang didiferensiasi pada orde pertama
Error Correction Term (residual lag 1)
 ECT =

ECM memiliki ciri khas dengan adanya unsur ECT (*Error Correction Term*). ECT merupakan residual yang timbul dalam metode ECM. Apabila koefisien ECT signifikan secara statistik, yaitu koefisien ECT < 1, maka spesifikasi model yang digunakan adalah valid.

2) Uji Prasyarat

Penelitian ini menggunakan dua uji prasyarat. Pertama, uji Stasioner (*Unit Root*

Test) untuk menentukan apakah data memiliki sifat nilai rata-rata serta varians yang konstan. *Unit Root* digunakan untuk mengetahui *stationarity* data. Jika hasil uji menolak hipotesis adanya *Unit Root* untuk semua variabel, berarti semua adalah *stationary*. Atau dengan kata lain, variabel-variabel terkointegrasi pada $I(0)$, sehingga estimasi akan dilakukan dengan menggunakan regresi linier biasa (OLS). Jika hasil uji *Unit Root* terhadap *level* dari variabel-variabel menerima hipotesis adanya *Unit Root*, berarti semua data adalah tidak *stationary* atau semua data terintegrasi pada orde $I(1)$. Jika semua variabel adalah tidak *stationary*, estimasi terhadap model dapat dilakukan dengan teknik kointegrasi.

Kedua, uji kointegrasi merupakan kelanjutan dari uji *Unit Root*. Suatu hubungan kointegrasi dapat dipandang sebagai hubungan jangka panjang (*equilibrium*). Penelitian ini menggunakan uji kointegrasi Engle-Granger (EG). Untuk melakukan uji EG ini, terlebih dahulu dilakukan regresi dari persamaan yang diteliti untuk memperoleh residualnya. Dari hasil residual ini kemudian diuji dengan ADF. Nilai statistik ADF kemudian dibandingkan dengan nilai kritisnya. Jika nilai statistiknya lebih besar dari nilai kritisnya maka variabel-variabel yang diamati saling berkointegrasi atau mempunyai hubungan jangka panjang.

3) Uji Asumsi Klasik

Sehubungan dengan pemakaian metode ECM, untuk menghasilkan nilai parameter model penduga yang lebih sah, maka model asumsi klasik harus diuji. Uji asumsi klasik tersebut terdiri dari:

Uji Normalitas

Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Pengambilan keputusan dengan Jarque-Bera *Test* atau J-B *Test* yaitu apabila probabilitas > 5%, maka variabel-variabel tersebut berdistribusi normal.

Uji Multikolinearitas

Multikolinieritas dapat dilihat dari *tolerance* and *variance inflation factor* (VIF). VIF mencoba melihat bagaimana varian dari suatu penaksir (*estimator*) meningkat seandainya ada multikolinieritas dalam suatu model empiris. Misalkan nilai R^2 dari hasil estimasi regresi secara parsial mendekati 1, maka nilai VIF akan mempunyai nilai tak terhingga. Dengan

demikian, bila kolinieritas meningkat, maka varian dari penaksir akan meningkat dalam limit yang tak terhingga. VIF dirumuskan sebagai berikut:

$$VIF = \frac{1}{1 - r^2_{x_1x_2}}$$

Berdasarkan Gujarati (2012: 416-417), jika VIF dari suatu variabel melebihi 10, dimana hal ini terjadi ketika nilai R^2 melebihi 0,09 maka suatu variabel dikatakan berkorelasi sangat tinggi.

Uji Heteroskedastisitas

Pengujian masalah heteroskedastisitas dilakukan dengan menggunakan uji *White Heteroscedasticity Test*. (Gujarati, 2012: 491-492). Pengujian ini dilakukan dengan cara melihat probabilitas *Obs*R-squared*-nya berdasarkan:

$H_0 : \delta = 0$

$H_1 : \delta \neq 0$

dengan kriteria uji sebagai berikut:

1. Probability *Obs*RSquare* < taraf nyata (α), maka terima H_0
2. Probability *Obs*RSquare* > taraf nyata (α), maka tolak H_0
3. Tolak H_0 maka persamaan tersebut tidak mengalami gejala heteroskedastisitas.

Uji Autokorelasi

Autokorelasi menunjukkan adanya korelasi antar variabel itu sendiri pada pengamatan yang berbeda waktu atau individu. Umumnya kasus autokorelasi banyak terjadi pada data *time series*. Pengambilan keputusan ada tidaknya autokorelasi dilakukan melalui Breusch-Godfrey *Serial Correlation Test*. Jika *p value* lebih tinggi dari *level of significance* yang biasa digunakan (1%, 5%, atau 10%) maka data terbebas dari autokorelasi (Ariefianto, 2012: 35).

4) Uji Statistik

Uji Signifikansi Simultan (Uji F)

Uji F digunakan untuk menunjukkan apakah keseluruhan variabel independen berpengaruh terhadap variabel dependen dengan menggunakan *level of significance* 5%, dengan rumus (Gujarati, 2012: 195):

$$F = \frac{R^2 / (k - 1)}{(1 - R^2) / (N - k)}$$

Dimana:

R^2 = Koefisien determinasi

n = Jumlah observasi

k = Jumlah variabel penjelas termasuk konstanta

H_0 diterima apabila $F \text{ hitung} \leq F \text{ tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama bukan merupakan variabel penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat. H_0 ditolak apabila $F \text{ hitung} > F \text{ tabel}$, artinya semua variabel bebas secara bersama-sama merupakan penjelas yang signifikan terhadap variabel terikat.

Uji Signifikansi Parsial (Uji t)

Uji statistik t menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen secara individual dalam menerangkan variasi variabel dependen. Pengujian dilakukan dengan menggunakan *significance level* 0,05 ($\alpha = 5\%$). Penerimaan atau penolakan hipotesis dilakukan dengan kriteria sebagai berikut:

- Bila nilai signifikan $t < 0,05$ maka H_0 ditolak, artinya terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.
- Bila nilai signifikan $t > 0,05$ maka H_0 diterima, artinya tidak terdapat pengaruh yang signifikan antara satu variabel independen terhadap variabel dependen.

Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Nilai R^2 yang sempurna adalah satu, yaitu apabila keseluruhan variasi dependen dapat dijelaskan sepenuhnya oleh variabel independen yang dimasukkan dalam model. Untuk $0 < R^2 < 1$, kesimpulan yang dapat diambil adalah nilai R^2 yang kecil atau mendekati nol, berarti kemampuan variabel-variabel bebas dalam menjelaskan variasi variabel tidak bebas sangat terbatas. Nilai R^2 mendekati satu, berarti kemampuan variabel-variabel bebas menjelaskan hampir semua informasi yang digunakan untuk memprediksi variasi variabel tidak bebas.

4 HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

a. Gambaran Umum Data Penelitian

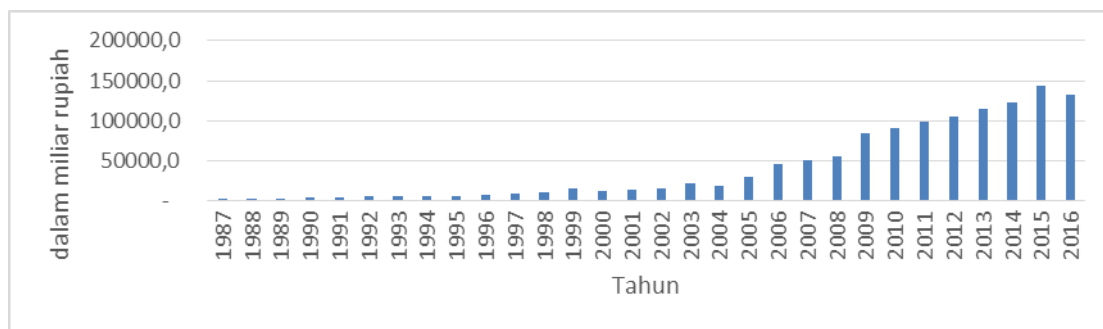
1) Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Untuk Sektor Pendidikan

Dalam kurun waktu 30 tahun, dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2016 terjadi kenaikan hampir 6600% dari anggaran sektor pendidikan. Meskipun demikian ada beberapa penurunan dari anggaran tahun sebelumnya sebanyak 3 kali, yaitu tahun 1988 yang mengalami penurunan sebesar Rp796 M dibanding tahun sebelumnya, tahun 1994 mengalami penurunan sebesar Rp376M dibanding tahun 1993, dan anggaran tahun 2004 yang mengalami penurunan sebesar Rp3.693M.

Meskipun dalam rentang waktu tersebut Indonesia mengalami dua kali krisis moneter, yaitu krisis tahun 1998 dan tahun 2008 akibat krisis global, tetapi pada tahun-tahun tersebut tidak terjadi penurunan anggaran pendidikan. Hal ini karena disadari bahwa pemerintah harus meningkatkan pengeluaran tersebut untuk

mendukung peningkatan kualitas sumber daya manusia. Kenaikan pengeluaran ini didasari pada penurunan daya beli masyarakat akibat krisis sehingga pemerintah, sesuai fungsi pada APBN, menggunakan wewenangnya untuk tetap menyediakan pelayanan umum dan tetap menjaga wajib belajar 12 tahun, sehingga tidak terjadi kenaikan angka putus sekolah.

Gambar 2 menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan tahun 1987 sampai dengan tahun 2016. Dalam gambar tersebut dijelaskan adanya kenaikan secara kontinyu terhadap pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dari tahun 1987 sebesar Rp2.007M, tahun 1990 naik menjadi sebesar Rp3.511M, dan saat terjadi krisis moneter tahun 1998, dimana terjadi pertumbuhan negatif terhadap perkonomian, pengeluaran sektor pendidikan tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp10.215M.



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1987-2016

Gambar 2
Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan Tahun 1987-2016

2) Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Untuk Sektor Kesehatan

Pengeluaran pemerintah pada sektor kesehatan mengalami peningkatan yang cukup signifikan juga pada tahun 2016. Hal ini karena pemerintah berusaha untuk memenuhi amanat pasal 171 Undang-undang nomor 36 tahun 2009 dimana dengan adanya Undang – undang ini, pengeluaran sektor kesehatan menjadi *mandatory spending* atau mutlak harus dipenuhi. Dalam pasal 171 ayat (1) dan (2) dinyatakan bahwa besar anggaran kesehatan pemerintah dialokasikan minimal sebesar 5% dari total APBN di luar gaji, sementara untuk pemerintah propinsi dan kabupaten/kota dialokasikan sebesar minimal 10% dari total APBD di luar gaji.

Dari rentang waktu tahun 1987 sampai dengan tahun 2016 dapat dilihat bahwa terjadi kenaikan hampir 29500% dari Rp209M pada tahun 1987 menjadi Rp59.639M pada tahun 2016. Peningkatan pengeluaran ini dilakukan untuk membuat kualitas sumber daya manusia yang unggul dan produktif. Hal ini tercermin dari kenaikan indeks pembangunan manusia Indonesia yang mengalami kenaikan menjadi sebesar 0.689 pada tahun 2015 dibanding 0,575 pada tahun 1990.

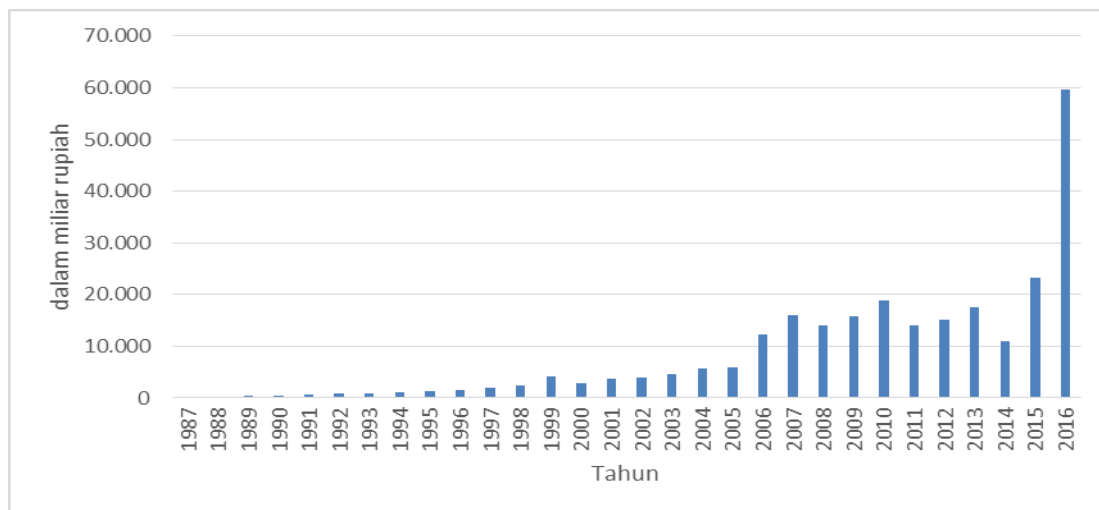
Kenaikan ini juga dipengaruhi oleh pertumbuhan penduduk yang makin pesat dimana penduduk yang makin banyak juga meningkatkan kebutuhan akan layanan kesehatan. Tren kenaikan anggaran sektor kesehatan juga beberapa kali mengalami

penurunan, yaitu pada tahun 2000 mengalami penurunan sebesar Rp1.398M dari tahun 1999, pada tahun 2008 mengalami penurunan sebesar Rp1.965M dari tahun 2007, pada tahun 2011 mengalami penurunan sebesar Rp4.704 M dari tahun 2010, dan pada tahun 2014 mengalami penurunan sebesar Rp6.683M dari tahun 2013.

Krisis moneter pada tahun 2008 menyebabkan adanya kontraksi pada pengeluaran sektor kesehatan. Hal ini karena pemerintah fokus untuk melakukan pengeluaran yang dapat bersifat penguatan sistem ekonomi dan daya beli masyarakat.

Gambar 3 menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tahun 1987 sampai

dengan tahun 2016. Dalam gambar tersebut dijelaskan adanya kenaikan secara kontinyu terhadap pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada tahun 1987 sebesar Rp210M dan tahun 1990 naik menjadi sebesar Rp497M. Tahun 2005 pengeluaran sektor kesehatan berada pada angka Rp5.837M naik dari tahun 2004 yang sebesar Rp5.595M. Pada tahun 2012 pengeluaran kesehatan sebesar Rp15.181M dan pada tahun 2016 dimana untuk pertama kalinya pemerintah menganggarkan 5% dari APBN, maka terjadi kenaikan hampir dua kali lipat nilai anggarannya menjadi sebesar Rp59.639M daripada tahun 2015 yang sebesar Rp23.225M.



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1987-2016

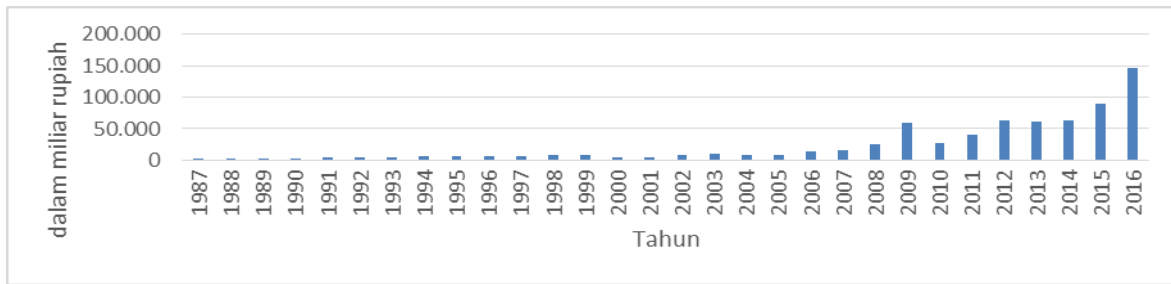
Gambar 3
Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan Tahun 1987-2016

3) Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Untuk Sektor Transportasi

Pengeluaran pemerintah sektor transportasi pada tahun 2016 sebesar Rp146,7 triliun naik hampir Rp57 triliun dari tahun 2015. Pengeluaran ini untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang dapat meningkatkan daya saing Indonesia di mata global. Peningkatan pengeluaran ini juga diharapkan mampu untuk menggerakkan faktor-faktor produksi dalam negeri seperti peningkatan konsumsi semen, dan tenaga kerja.

Gambar 4 menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor transportasi tahun 1987

sampai dengan tahun 2016. Dalam gambar tersebut dijelaskan adanya kenaikan secara kontinyu terhadap pengeluaran pemerintah sektor transportasi. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998, pengeluaran sektor transportasi tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp8.733M. Pada tahun 2012, pengeluaran transportasi sebesar Rp62.576M, naik hampir sekitar 50% dari tahun 2011 yang sebesar Rp40.977M. Kenaikan paling signifikan terjadi pada tahun 2016 dimana anggaran sektor transportasi sebesar Rp146.743M yang diakibatkan oleh program-program pembangunan infrastruktur transportasi yang padat modal.



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1987-2016

Gambar 4
Pengeluaran Pemerintah Sektor Transportasi

4. Alokasi Anggaran Belanja Pemerintah Untuk Sektor Perumahan

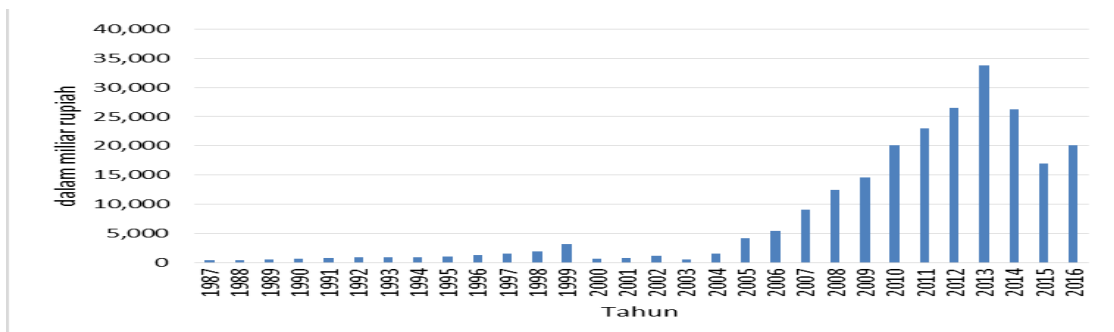
Alokasi anggaran untuk sektor perumahan selama ini kurang begitu menjadi prioritas pemerintah. Hal ini tercermin dari turunnya belanja sektor ini di 2016 jika dibandingkan dari anggaran tahun 2013. Secara berturut-turut dari tahun 2013 sebesar Rp33.7T, turun menjadi Rp26.2T pada tahun 2014, turun lagi menjadi hanya Rp26T pada tahun 2015, lalu naik menjadi Rp20,1T pada tahun 2016.

Kenaikan jumlah penduduk yang secara otomatis akan meningkatkan permintaan akan rumah sebagai kebutuhan primer papan bagi masyarakat, bila tidak disertai dengan ketersediaan perumahan akan mengakibatkan *backlog* dalam penyediaan perumahan. *Backlog* ketersediaan rumah adalah salah satu indikator yang digunakan oleh Pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategis (Renstra) maupun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMN) yang terkait bidang perumahan untuk mengukur jumlah kebutuhan rumah di Indonesia. *Backlog* rumah dapat diukur

dari dua perspektif yaitu dari sisi kepenghunian maupun dari sisi kepemilikan.

Gambar 5 menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor perumahan tahun 1987 sampai dengan tahun 2016. Dalam gambar tersebut dijelaskan adanya fluktuasi pengeluaran pemerintah sektor perumahan dimana pada tahun 1987 sebesar Rp417M dan tahun 1990 naik menjadi sebesar Rp736M. Saat terjadi krisis moneter tahun 1998, yang disinyalir terjadi *bubble economy* sector perumahan, pengeluaran sektor perumahan tetap mengalami peningkatan yaitu sebesar Rp1.963M. Tahun 2005 pengeluaran sektor perumahan berada pada angka Rp4.216M naik lebih dari 150% dari tahun 2004 yang sebesar Rp1.589M. Pada tahun 2012 pengeluaran perumahan sebesar Rp26.440M.

Fluktuatifnya anggaran ini menjadi bukti bahwa sektor perumahan belum menjadi alat untuk menyokong pertumbuhan ekonomi pada asumsi penyusunan APBN. Hal ini bias terlihat pada gambar berikut.



Sumber: LKPP dan Nota Keuangan Pemerintah Pusat, 1987-2016

Gambar 5
Pengeluaran Pemerintah Sektor Perumahan Tahun 1987-2016

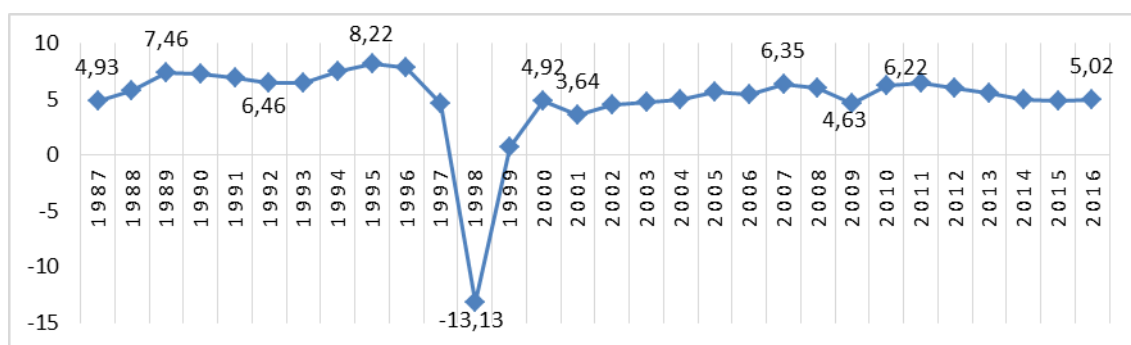
5. Deskripsi Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi di Indonesia mengalami perkembangan yang fluktuatif dari tahun 1987 sampai dengan tahun 2016. Pemerintah Indonesia berhasil menaikkan pertumbuhan ekonomi hingga mencapai 7,46% mulai tahun 1989 dan pergerakan pertumbuhan ekonomi cenderung tidak fluktuatif hingga tahun 1996. Pada tahun 1997, kondisi perekonomian Indonesia mengalami keterpurukan karena adanya krisis moneter yang pada akhirnya menyebabkan penurunan yang sangat tajam di tahun 1998, yaitu mencapai -13,13%. Hal ini menyebabkan naiknya angka kemiskinan di Indonesia, sehingga kebijakan pemerintah diarahkan untuk meningkatkan daya beli masyarakat.

Sampai dengan tahun 1999, kebijakan fiskal pemerintah memainkan peranan penting untuk memulihkan kondisi keuangan pemerintah. Beberapa hal yang dilakukan pemerintah adalah

upaya penyehatan industri perbankan dengan cara menutup bank-bank yang tidak sehat, membatalkan atau menunda proyek-proyek besar untuk memperketat pengeluaran APBN serta mengurangi impor barang untuk mempertahankan cadangan devisa.

Setelah tahun 2000, pertumbuhan ekonomi Indonesia berangsur membaik dan mengalami tren peningkatan. Hingga kemudian di tahun 2008, terjadi lagi krisis ekonomi di Amerika Serikat yang berdampak pada terjadinya krisis global. Pada tahun 2009, pertumbuhan ekonomi Indonesia turun tajam hingga mencapai 4,63%. Kebijakan pemerintah pada saat itu diarahkan untuk menyehatkan perekonomian melalui sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM). Terbukti krisis periode ini tidak terlalu berpengaruh terhadap industri UMKM. Perkembangan pertumbuhan ekonomi di Indonesia dapat dilihat pada Gambar 6 di bawah ini.



Sumber: Diolah dari situs Badan Pusat Statistik (www.bps.go.id)

Gambar 6
Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Tahun 1987 s.d. 2016

b. Hasil Penelitian

1) Uji Stationer (*Unit Root Test*)

Dalam menggunakan metode ECM pertama kali yang perlu dilakukan adalah uji stasioner atau uji akar unit dari data dengan menggunakan *Phillips-Perron Test* (PP Test), dimana jika nilai probabilitas lebih kecil dari $\alpha=5\%$ maka data tersebut dapat dikatakan stasioner. Dengan cara yang sama, uji derajat integrasi juga akan dilakukan jika data ternyata belum stasioner pada level. Hasil uji akar unit dan uji derajat integrasi dapat dilihat pada Tabel 2.

Pada tabel 2 nampak bahwa variabel PDB dan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan belum

stasioner dalam level. Kemudian dilakukan uji derajat integrasi pertama (*1st Difference*). Hasil uji derajat integrasi tingkat pertama terlihat bahwa kelima variabel yang diambil dalam penelitian ini sudah stasioner.

Apabila derajat kombinasi linier dari variabel-variabel tersebut stasioner, maka dapat dikatakan bahwa variabel-variabel tersebut berkointegrasi. Untuk mengetahui hubungan kointegrasi tersebut, maka dilakukan uji kointegrasi.

2) Uji Kointegrasi

Uji kointegrasi dilakukan dengan terlebih dahulu memastikan bahwa semua variabel yang digunakan dalam model memiliki derajat

integrasi yang sama. Dari hasil pengujian, seluruh data dalam penelitian ini memiliki derajat integrasi yang sama, yaitu berintegrasi pada I(1). Oleh karena itu maka uji kointegrasi dapat dilakukan. Hasil uji kointegrasi dari data yang akan digunakan dalam penelitian ini dengan menggunakan metode *residual based test* disajikan dalam Tabel 3.

Pada Tabel 3 terlihat bahwa kointegrasi antara variabel-variabel yang akan dipakai dalam penelitian ini ditunjukkan melalui tingkat signifikansi probabilitas dari nilai residualnya yang lebih kecil dari nilai kritis 5% bahkan 1%. Cara lain yang dapat digunakan adalah dengan melihat nilai PP t-stat yang lebih besar dari *Critical Values*, sehingga data terkointegrasi pada I(0). Dapat disimpulkan bahwa variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini saling berkointegrasi. Oleh sebab itu, model ini lolos dari uji kointegrasi sehingga *Error Correction Model* dapat digunakan dalam penelitian.

3) Hasil Estimasi Model Jangka Panjang

Setelah diketahui bahwa variabel dependen dan variabel independen saling berkointegrasi, berarti terdapat keseimbangan dalam jangka panjang antar variabel tersebut. Ringkasan hasil

estimasi koefisien jangka panjang dapat dilihat dalam Tabel 4.

4) Uji Signifikansi Parameter Secara Simultan (Uji F)

Uji ini dilakukan untuk melihat pengaruh variabel-variabel independen terhadap variabel dependen secara keseluruhan. Jika nilai F-hitung lebih besar dibandingkan nilai F-tabel atau jika nilai probabilitas F-stat lebih kecil dari $\alpha=1\%$ berarti bahwa secara bersama-sama variabel yang terdapat dalam model berpengaruh signifikan terhadap variabel dependennya. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa variabel-variabel independen secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap PDB Indonesia. Hal tersebut ditunjukkan oleh nilai F-hitung sebesar 212,8573 yang lebih besar dari F-tabel yang sebesar 4,22 dimana nilai probabilitasnya sebesar 0,0000 yang berarti lebih kecil dari $\alpha=1\%$. Dari kedua pembuktian tersebut, maka model jangka panjang dalam penelitian ini dapat digunakan untuk memprediksi pertumbuhan ekonomi Indonesia atau dengan kata lain secara keseluruhan variabel independennya mampu menerangkan variabel dependen secara signifikan.

Tabel 2
Hasil Uji Akar Unit dan Uji Derajat Integrasi dengan Uji PP

Variabel	Level		1st Difference		Ordo of Integration
	t-stat	Prob	t-stat	Prob	
PDB	0,447159	0,8878	3,777761	0,0081	I(1)
Pendidikan	0,738504	0,8213	8,615436	0,0000	I(1)
Kesehatan	0,661655	0,8411	5,313258	0,0002	I(1)
Transportasi	0,097250	0,9600	5,834319	0,0000	I(1)
Perumahan	0,838067	0,7930	5,346787	0,0002	I(1)

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 3
Hasil Uji Kointegrasi

PP t-stat	Critical Value	Prob
-3,895569	1% level -3,679322 -2,967767	0,0059
	5% level -2,622989	
	10% level	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 4
Ringkasan Hasil Estimasi Model Jangka Panjang Metode ECM

Variabel	Koefisien	Std Error	T-Stat	Prob
Konstanta	5,277869	0,368545	14,32084	0,0000*
Pendidikan	0,173087	0,060892	2,842535	0,0088*
Kesehatan	0,023060	0,043184	0,533995	0,5981
Transportasi	0,128065	0,038859	3,295657	0,0029*
Perumahan	-0,02773	0,060892	-0,902463	0,3754
R ²	0,971475	F Stat	212,8573	
Adjusted R ²	0,966911	Prob (F-stat)	0,000000*	

Keterangan: * = signifikan di level $\alpha=5\%$

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

5) Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial (Uji t)

Pengujian koefisien regresi secara individual (uji t) dilihat dari signifikansi t-statistik. Uji t bertujuan untuk melihat signifikansi pengaruh variabel independen terhadap variabel dependen secara individual. Parameter suatu variabel dikatakan mempunyai pengaruh yang signifikan jika nilai t-hitung lebih besar dari t-tabel atau dapat juga dilihat dari nilai probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari $\alpha=1\%$, $\alpha=5\%$ atau $\alpha=10\%$. Dalam penelitian ini digunakan $\alpha=5\%$ dan nilai t-tabel sebesar 1,697. Berdasarkan Tabel 4 dapat dilihat bahwa hanya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (P) dan transportasi (T) yang signifikan dalam model ini, karena nilai probabilitasnya lebih kecil dari $\alpha=5\%$ dan t-hitungnya lebih besar dari t-tabel. Selain itu, variabel P juga memiliki koefisien yang positif sebesar 0,173087, sehingga setiap kenaikan variabel P akan disertai kenaikan PDB Indonesia. Secara keseluruhan hal ini memiliki arti bahwa setiap penambahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah sektor kesehatan sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan PDB Indonesia sebesar 0,173087 miliar rupiah dan berpengaruh secara nyata pada tingkat kepercayaan 5%.

Sementara itu, variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi signifikan dan memiliki koefisien yang positif sebesar 0,128065. Dengan demikian, setiap kenaikan pengeluaran pemerintah sektor transportasi akan disertai dengan kenaikan PDB. Hal ini berarti setiap penambahan yang terjadi pada pengeluaran pemerintah sektor transportasi sebesar satu miliar rupiah akan meningkatkan PDB sebesar 0,128065 miliar rupiah.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (K) tidak signifikan berpengaruh terhadap PDB Indonesia karena memiliki probabilitas 0,5981 yang lebih besar dari $\alpha=1\%$. Selain itu nilai t-stat dari K adalah 0,533995. Nilai t-stat tersebut lebih kecil dari t tabel yang bernilai 1,697.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan (R) juga tidak signifikan berpengaruh terhadap PDB Indonesia karena probabilitas 0,3754 lebih besar dari $\alpha=5\%$ dimana nilai koefisien dari pengeluaran pemerintah sektor kesehatan adalah -0,027730. Dapat juga dilihat dari nilai t-hitungnya, yaitu bernilai -0,902463 yang lebih kecil dari t-tabelnya. Hasil tersebut menunjukkan bahwa dalam jangka panjang pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

6) Koefisien Determinasi (R²)

Koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Berdasarkan tabel 4 di atas dapat dilihat koefisien determinasi (R²) adalah sebesar 0,971475. Hal ini berarti sebesar 97,15% variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia bisa dijelaskan dari variasi ke empat variabel independen. Sedangkan sisanya 2,75% dijelaskan oleh variabel lain di luar model.

7) Hasil Estimasi Model Regresi Jangka Pendek

Setelah mengetahui hasil estimasi jangka panjang, maka perlu diketahui bagaimana hasil estimasi model regresi jangka pendek. Model regresi jangka pendek dalam penelitian ini menggunakan *2nd difference* dan menggunakan variabel *Error Correction Term* (ECT).

Ringkasan hasil estimasi koefisien jangka pendek dapat dilihat dalam Tabel 5.

8) Pengujian Asumsi Klasik Model Jangka Pendek

Uji Normalitas

Hasil uji normalitas dengan menggunakan uji Jarque-Bera (JB) dapat dilihat pada Tabel 6. Berdasarkan tabel ini, nilai Jarque-Bera yang diperoleh adalah sebesar 0,272755 dan dengan nilai probabilitas lebih dari 5%, maka variabel-variabel yang digunakan dalam penelitian ini berdistribusi normal. Selain itu, uji normalitas dapat dilakukan dengan membandingkan nilai J-B Test dengan nilai tabel *Chi Square*. Data berdistribusi normal jika nilai J-B lebih kecil dari nilai tabel *Chi Square*. Nilai tabel *Chi Square* untuk empat variabel independen dan tingkat signifikansi 5% adalah sebesar 9,48773, sehingga nilai J-B lebih kecil dari nilai tabel *Chi Square* ($0,272755 < 9,48773$).

Uji Heteroskedasitas

Untuk mendeteksi ada tidaknya heteroskedasitas dapat dilakukan dengan Uji *White Heteroscedasticity-Consistent Standar Error and Covarian*. Dari tabel *white* diketahui bahwa *Obs*Rsquared* sebesar 9.535847 sedangkan χ tabel nilainya 43,7729. Jika berdasarkan probabilitas *Obs*Rsquared*, nilainya 0,7953 melebihi $\alpha=5\%$. Dari perbandingan ini, persamaan yang dipakai dalam penelitian diketahui tidak terjadi heteroskedasitas. Untuk rincian hasil pengujian ini dapat dilihat pada Tabel 7.

Uji Autokorelasi

Uji autokorelasi dapat dilihat dari hasil uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* dimana jika nilai *Obs*Rsquared* kurang dari alfa, maka

dapat dikatakan bahwa terdapat autokorelasi. Berdasarkan Tabel 8 mengenai uji *Breusch-Godfrey Serial Correlation* Model Jangka Pendek, nilai probabilitas dari *Obs*Rsquared* sebesar 0,1541 melebihi $\alpha=5\%$. Sehingga dapat disimpulkan bahwa tidak ada masalah autokorelasi dalam model jangka pendek.

Uji Multikolinearitas

Uji multikolinearitas adalah untuk menguji apakah ada hubungan linear yang sempurna atau mendekati hampir sempurna variabel-variabel bebas dalam penelitian. Untuk mengetahui ada tidaknya multikolinearitas dapat digunakan uji *auxiliary regression* dan melihat nilai *variance inflation factor* (VIF) variabel-variabel bersangkutan. Dalam penelitian ini data harus dilakukan *1st difference* terlebih dahulu untuk menghasilkan uji multikolinearitas yang baik. Tabel 9 dan 10 menjelaskan hasil dari uji multikolinearitas dalam penelitian ini. Dalam tabel 9 dapat dilihat bahwa tidak terdapat korelasi yang signifikan antar variabel-variabel dalam penelitian ini. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat multikoliniearitas.

Berdasarkan hasil dari matriks korelasi pada Tabel 9, tidak terdapat korelasi antar variabel independen yang tinggi di atas 90%. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa dalam penelitian ini tidak terdapat multikolinearitas.

Berdasarkan Tabel 10 dapat dilihat bahwa tidak terdapat satupun variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Begitu juga dengan hasil perhitungan VIF, tidak terdapat variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Sehingga sekali lagi dapat dibuktikan bahwa tidak terdapat multikolinearitas dalam variabel-variabel penelitian ini.

Tabel 5
Hasil Estimasi Model Regresi Jangka Pendek

Variabel	Koefisien	Std Error	T-Stat	Prob
Konstanta	-0,000378	0,007863	-0,048065	0,9621
D (P, 2)	0,009496	0,024470	0,388066	0,7017
D (K, 2)	5,05E-05	0,020129	0,002511	0,9980
D (T, 2)	-0,011539	0,016575	-0,696188	0,4936
D (R, 2)	-0,003065	0,013271	-0,230918	0,8195
ECT	-0,685605	0,207013	-3,311898	0,0032
R ²	0,374337	F Stat	2,632544	
Adjusted R ²	0,232141	Prob (F-stat)	0,051872**	

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 6
Uji Jarque-Bera (JB Test) Model Jangka Pendek

JB Hitung	Prob
0,272755	0,872513

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 7
Uji Heteroskedastisitas

F-statistic	0.499262
Obs*R-squared	9.535847
Scaled explained SS	5.333515
Prob. F(14,15)	0.8990
Prob. Chi-Square(14)	0.7953
Prob. Chi-Square(14)	0.9806

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 8
Uji Breusch-Godfrey Serial Correlation Model Jangka Pendek

Obs*R-squared	Prob
3.739760	0,1541

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 9
Matriks Korelasi

	DPDB	DDIK	DKES	DTRANS	DRMH
DPDB	1.000000	0,000294	-0,036828	-0,011446	-0,029055
DDIK	0,000294	1.000000	0,311120	0,324902	0,254962
DKES	-0,036828	0,311120	1.000000	0,295694	0,257988
DTRANS	-0,011446	0,324902	0,295694	1.000000	0,290385
DRMH	-0,029055	0,254962	0,257988	0,290385	1.000000

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

Tabel 10
Perhitungan Tolerance dan Variance Inflation Factor (VIF)

Variabel	R ²	Tolerance	VIF
Pendidikan	0,172557	0,82744	1,208543
Kesehatan	0,159237	0,84076	1,189396
Transportasi	0,179259	0,82074	1,218412
Perumahan	0,133870	0,86613	1,154561

Sumber: Hasil Pengolahan Data Menggunakan Eviews 8

9) Uji Signifikansi Parameter Secara Simultan (Uji F)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa differensi kedua dari variabel independen (pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan) secara bersama-sama mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek. Hal ini ditunjukkan oleh nilai probabilitas F-statistik yaitu 0,051872 yang lebih kecil dari $\alpha=10\%$.

10) Uji Signifikansi Parameter Secara Parsial (Uji T)

Pengujian koefisien signifikansi jangka pendek secara individual dilakukan dengan uji t yang telah disajikan dalam tabel 5. Berdasarkan tabel ini dapat dilihat bahwa untuk persamaan yang diambil dalam penelitian ini dalam jangka pendek, differensi kedua dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan (D(P,2)), pengeluaran pemerintah sektor kesehatan (D(K,2)), transportasi (D(T,2)) dan perumahan (D(R,2)) secara parsial tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Dapat

dilihat dalam tabel diatas probabilitas t-statistik dari ketiga variabel tersebut nilainya 0,7017; 0,9980; 0,4936 dan 0,8195, dimana nilai tersebut lebih besar dari tingkat kepercayaan pada tingkat kepercayaan 5 persen. Hal ini dilihat dengan membandingkan nilai t hitung dengan nilai t tabelnya. Jika dilihat dari koefisiennya, pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan kesehatan berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan pengeluaran pemerintah sektor transportasi dan perumahan berpengaruh secara negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa koefisien *error correction term* (ECT) untuk persamaan yang diambil menghasilkan tanda yang diharapkan, yaitu bertanda positif dan secara statistik signifikan pada $\alpha=5\%$, dimana nilai koefisiennya negatif yaitu -0,685605. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa model ECM dapat digunakan dalam mengestimasi faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia selama periode penelitian atau dapat dikatakan spesifikasi model yang digunakan adalah sah atau valid. Nilai koefisien penyesuaian (*coefficient of adjustment*) yaitu sebesar -0,685605 berarti bahwa sekitar

68,56% ketidaksesuaian antara pertumbuhan ekonomi yang aktual dengan yang diinginkan akan dieliminasi atau dihilangkan dalam satu tahun.

11) Koefisien Determinasi (R^2)

Berdasarkan tabel 5 dapat dilihat bahwa koefisien determinasi dari model menunjukkan seberapa besar kemampuan variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Koefisien determinasi (R^2) adalah sebesar 0,374337. Hal ini berarti sebesar 37,43% variasi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam jangka pendek dapat dijelaskan dari variasi variabel independen pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan. Sedangkan 62,57% sisanya dijelaskan oleh variabel-variabel lain di luar model.

c. Interpretasi Hasil dan Pembahasan

Dari data yang diperoleh, telah dilakukan pengolahan data menggunakan *Error Correction Model* untuk mengetahui perilaku jangka pendek maupun perilaku jangka panjang dari faktor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Variabel dependen yang digunakan adalah PDB Indonesia, sedangkan variabel independen yang digunakan adalah pengeluaran pemerintah di sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan. Dari keempat variabel independen yang digunakan dalam penelitian ini, secara individual pengeluaran pemerintah tidak ada yang signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek. Hal tersebut terlihat dari probabilitas signifikansi yang lebih besar dari $\alpha=5\%$. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDB dalam jangka pendek hanya dipengaruhi oleh *error correction term*. Persamaan matematis atas model jangka pendek dapat dilihat pada persamaan berikut:

$$D(Y,2) = 0,000378 + 0,009496 \text{ Log}(P,2) \\ (0,9621) \quad (0,7017) \\ + 0,00005(K,2) - 0,011539(T,2) \\ (0,9980) \quad (0,4936) \\ - 0,003065(R,2) - 0,685606 \text{ ECT} \\ (0,8195) \quad (0,0032)$$

Keterangan:

Signifikan pada $\alpha=5\%$, angka dalam kurung menunjukkan nilai probabilitas t-statistik.

DY = Differensiasi kedua dari variabel

DP PDB Indonesia

- DK = Differensiasi kedua dari variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
- DR = Differensiasi kedua dari variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
- DT = Differensiasi kedua dari variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan
- ECT = Differensiasi kedua dari variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi
- = *Error Correction Term*

Sedangkan dalam jangka panjang, hanya variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan transportasi yang signifikan terhadap variabel dependen PDB Indonesia. Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dan perumahan tidak signifikan karena memiliki probabilitas signifikan yang lebih besar dari $\alpha=5\%$. Sehingga dalam penelitian ini variabel PDB dalam jangka panjang dipengaruhi oleh pengeluaran pemerintah sektor perumahan dan transportasi.

Berikut ini adalah persamaan matematis penelitian:

$$Y = 5,277869 + 0,173087P + 0,023060K + 0,128065T - 0,027330R$$

(0,0000)* (0,0088)*
 (0,5981)
 (0,0029)* (0,3754)

Keterangan:

Signifikan pada $\alpha=5\%$. Angka dalam kurung menunjukkan nilai probabilitas t-statistik

- Y = PDB Indonesia
- P = pengeluaran pemerintah sektor pendidikan
- R = pengeluaran pemerintah sektor kesehatan
- T = pengeluaran pemerintah sektor perumahan
- K = pengeluaran pemerintah sektor transportasi

Dalam jangka panjang konstanta memiliki nilai positif, hal ini memiliki arti bahwa jika variabel lain dianggap tetap atau konstan, maka ada kecenderungan untuk peningkatan PDB. Hal ini sesuai karena PDB tidak hanya terdiri dari pengeluaran pemerintah tetapi juga oleh

penerimaan pemerintah. Penerimaan pemerintah dapat meningkatkan PDB Indonesia.

1) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka pendek tidak signifikan. Hal tersebut tidak sejalan dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi hasil penelitian tidak menunjukkan kesesuaian teori dimana pengeluaran pemerintah sektor pendidikan seharusnya berpengaruh signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Sedangkan variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka panjang berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia, karena memiliki probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dalam penelitian ini, bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan Indonesia.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan hasil penelitian Bastias (2010) yang menemukan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan di Indonesia baik jangka pendek maupun jangka panjang tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Menurut Teori *Human Capital* bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dapat meningkatkan kualitas penduduk yang kemudian selanjutnya meningkatkan pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini sejalan dengan teori tersebut bahwa pengeluaran untuk sektor pendidikan akan berdampak jangka panjang. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bersifat seperti akumulasi investasi pada kompetensi sumber daya manusia. Seperti yang dikemukakan oleh Widodo (2011) dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah atas sektor publik khususnya pendidikan, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen, maka variabel pengeluaran pemerintah ini juga harus berinteraksi dengan variabel lain. Selain itu pengeluaran pemerintah sektor pendidikan yang akan menghasilkan perbaikan di sektor ini tidak dapat secara cepat

mengubah kualitas masyarakat, khususnya angkatan kerja yang sekarang sudah terbentuk.

Apabila dicermati dalam grafik pertumbuhan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan pada Gambar 2, nilai pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, mulai mengalami kenaikan pada tahun 2003, dimana pada tahun tersebut diterbitkan kebijakan pemerintah bahwa anggaran untuk pendidikan minimal 20%. Dari tahun tersebut, tren pengeluaran pemerintah sektor pendidikan mengalami kenaikan sampai dengan sekarang. Perbaikan di sektor pendidikan yang dimulai pada tahun tersebut, baru mulai dirasakan hasilnya sebagai perubahan pada tampilan fisik dunia pendidikan yang ada di Indonesia.

2) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Kesehatan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka pendek memiliki arah hubungan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia namun tidak signifikan. Hasil yang diperoleh tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini. Seharusnya berdasarkan teori, hubungan pengeluaran pemerintah sektor kesehatan di negara sedang berkembang seperti Indonesia sedang mengalami tahap perkembangan menengah, dimana pemerintah harus menyediakan lebih banyak sarana publik dalam bidang kesehatan untuk meningkatkan produktifitas ekonomi. Sarana kesehatan serta jaminan kesehatan harus dirancang sedemikian rupa oleh pemerintah melalui pengeluaran pemerintah yang tepat sasaran.

Dalam jangka pendek pengeluaran pemerintah sektor kesehatan memang belum dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, karena dampak proses perbaikan kesehatan masyarakat melalui pengeluaran pemerintah tersebut tidak dapat langsung terlihat pengaruhnya. Terdapat jarak waktu ketika pemerintah mengeluarkan sejumlah anggaran pembangunan untuk kesehatan sampai dengan kualitas kesehatan masyarakat meningkat dan pada akhirnya berkontribusi pada peningkatan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Contohnya adalah seperti peningkatan pelayanan kesehatan melalui kebijakan Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (SKN) yang mengatur bahwa SKN adalah pengelolaan kesehatan yang diselenggarakan oleh semua komponen Bangsa Indonesia secara

terpadu dan saling mendukung guna menjamin tercapainya derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya.

Berdasarkan Peraturan Presiden No.72 tahun 2012 tersebut, di Indonesia mulai melakukan reformasi di bidang kesehatan seperti perbaikan regulasi dan pembiayaan, peningkatan pelayanan kesehatan dan sumber daya kesehatan di seluruh wilayah Indonesia. Salah satu contohnya adalah regulasi mengenai Badan Penyelenggara Jaminan Sosial yang merupakan sentralisasi dari penyelenggaraan jaminan sosial yang meliputi jaminan kesehatan dan jaminan ketenagakerjaan yang dimulai tahun 2014. Dalam jangka pendek reformasi atas pelayanan kesehatan tersebut belum mampu dilihat pengaruh signifikansinya terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Berdasarkan penelitian ini pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka panjang memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hasil penelitian ini sejalan dengan Bastias (2010) dimana pengeluaran pemerintah sektor kesehatan tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Menurut Bastias (2010: 130-131) ini dapat disebabkan oleh masih kurang lamanya dampak pembangunan di sektor kesehatan bagi pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Selain itu, hal ini juga dapat dikarenakan rendahnya kualitas penganggaran dan realisasi belanja pemerintah di sektor kesehatan sehingga tidak menimbulkan dampak yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

Berdasarkan grafik pengeluaran pemerintah sektor kesehatan pada Gambar 3, dapat dilihat bahwa pengeluaran pemerintah di sektor kesehatan mulai mengalami tren kenaikan yang signifikan sejak tahun 2006 dimana saat itu pemerintah mulai mencanangkan program JAMKESMAS untuk pelayanan kesehatan masyarakat miskin. Sebelum periode waktu tersebut anggaran kesehatan memiliki porsi yang sangat kecil sehingga dalam jangka panjang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi.

3) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Transportasi terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi dalam jangka pendek tidak signifikan dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hubungan antara variabel

pengeluaran pemerintah sektor transportasi terhadap pertumbuhan ekonomi adalah negatif. Hasil penelitian ini tidak sesuai dengan teori dan hipotesis.

Infrastruktur merupakan suatu modal fisik pendukung utama agar pembangunan ekonomi suatu negara dapat terwujud. Infrastruktur juga menunjukkan seberapa besar pemerataan pembangunan terjadi. Suatu negara yang memiliki pertumbuhan ekonomi tinggi dan mampu melakukan pemerataan pembangunan pasti dapat melakukan pembangunan infrastruktur ke seluruh bagian wilayahnya.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor transportasi memiliki hubungan yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena pembiayaan atas pembangunan di sektor transportasi membutuhkan dana yang besar dan prosesnya membutuhkan waktu yang lama sehingga manfaat tidak dapat dirasakan dalam jangka pendek.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya signifikan karena memiliki probabilitas t-statistik yang lebih kecil dari $\alpha=5\%$. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah sektor transportasi berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas infrastruktur meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Menurut pandangan makroekonomi yang dikemukakan Musgrave (1989), pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat. Barang publik yang dimaksud dapat berupa penyediaan infrastruktur berupa transportasi sehingga akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

4) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Perumahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan dalam jangka pendek tidak signifikan mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut terlihat dari probabilitas

t-statistik yang lebih besar dari $\alpha=5\%$. Namun hubungannya tidak sesuai dengan hipotesis yang digunakan dalam penelitian, dimana pengeluaran pemerintah sektor perumahan akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia. Jadi hasil penelitian menunjukkan ketidaksesuaian dengan teori. Penelitian yang dilakukan World Bank (2004) mengemukakan bahwa rendahnya investasi dapat disebabkan oleh rendahnya ketersediaan infrastruktur khususnya perumahan sehingga integrasi ekonomi tidak terwujud yang mengakibatkan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Hasil penelitian ini yang menunjukkan pengeluaran pemerintah sektor perumahan tidak mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, dikarenakan proyek pembangunan infrastruktur di negara sedang berkembang seperti Indonesia banyak yang tidak dapat terselesaikan dalam jangka pendek. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya pembangunan yang dilaksanakan dengan skema *multi years*. Seperti contoh, yaitu pembangunan rumah susun di Pasar Rumput, Kemayoran, Pondok Kelapa dan Pasar Minggu yang menggunakan skema *multi years*, ini memang akan memperingan tekanan pada APBN tetapi juga menyebabkan keterlambatan dalam pemberian pelayanan kepada masyarakat.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan dalam jangka panjang memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan pengaruhnya tidak signifikan karena memiliki probabilitas t-statistik yang lebih besar dari $\alpha=5\%$. Hasil tersebut bermakna bahwa pengeluaran pemerintah sektor perumahan tidak berpengaruh secara nyata terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hasil ini tidak sesuai dengan hipotesis dan teori yang menyatakan jika pengeluaran pemerintah atas infrastruktur meningkat akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.

Salah satu penyebab pengeluaran pemerintah sektor perumahan memiliki hubungan negatif dan tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia adalah karena pengeluaran pemerintah untuk pembangunan sektor perumahan digunakan untuk membangun rumah-rumah tinggal untuk masyarakat berpenghasilan rendah (MBR). Sifat pengeluaran pemerintah ini pada dasarnya ditujukan untuk menaikkan daya beli masyarakat atas kebutuhan perumahan, sehingga tidak terjadi kenaikan pertumbuhan ekonomi

secara langsung dan signifikan dari jenis pengeluaran ini.

Hasil dari penelitian ini tidak sejalan dengan teori Brian Berry dalam Rondinelli (1985: 38) bahwa seiring dengan pertumbuhan ekonomi suatu wilayah, maka pusat-pusat (*central places*) yaitu permukiman-permukiman yang juga melayani penduduk di sekitarnya akan menyebar dan membentuk suatu sistem yang terintegrasi dan akan mendorong pertumbuhan ekonomi suatu wilayah.

5) Pengaruh Pengeluaran Pemerintah Sektor Pendidikan, Kesehatan, Transportasi dan Perumahan terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia

Berdasarkan hasil penelitian ini, secara simultan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik jangka panjang maupun jangka pendek. Yang membedakan jangka panjang dan jangka pendek adalah tingkat signifikansinya. Untuk jangka panjang berada pada tingkat signifikansi $\alpha=5\%$, sedangkan untuk jangka pendek berada pada tingkat signifikansi $\alpha=10\%$.

Berbeda dengan hasil uji parsial, dimana masing-masing pengeluaran pemerintah tidak memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dalam jangka pendek, hal ini menunjukkan bahwa memang pengeluaran pemerintah tidak dapat dilihat secara terpisah dan harus diperhitungkan secara bersama-sama dalam mempengaruhi pertumbuhan ekonomi.

Hasil penelitian ini sejalan dengan Bastias (2010) dan Widodo (2011) yang menyatakan dalam penelitiannya bahwa pengeluaran pemerintah atas sektor publik, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Suatu pengeluaran pemerintah harus diperhitungkan secara simultan dengan pengeluaran pemerintah yang lain untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mendapatkan manfaat terbaik.

5. SIMPULAN

Dari uraian yang telah dikemukakan dan setelah membahas mengenai pengaruh pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi, dan perumahan terhadap pertumbuhan ekonomi dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

Secara simultan pengeluaran pemerintah sektor pendidikan, kesehatan, transportasi dan perumahan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Indonesia baik jangka panjang maupun jangka pendek.

- a. Dimana hasil ini sejalan dengan penelitian Bastias (2010) dan Widodo (2011) yang menyatakan bahwa pengeluaran pemerintah atas sektor publik, tidak dapat berdiri sendiri sebagai variabel independen. Suatu pengeluaran pemerintah harus diperhitungkan secara simultan dengan pengeluaran pemerintah yang lain untuk dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi di Indonesia dan mendapatkan manfaat terbaik.
- b. Variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dalam jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Sedangkan dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor pendidikan berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal ini terjadi karena pengeluaran pemerintah sektor pendidikan bersifat seperti investasi yang tidak dapat secara langsung memberikan kontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi.
- c. Variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan dalam jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor kesehatan juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi dalam jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi bahkan memiliki arah yang negatif. Hal ini dikarenakan besarnya jumlah dana yang dikeluarkan untuk pembangunan sektor transportasi, sedangkan pembangunan ini tidak selesai dalam waktu yang cepat dan pengaruhnya juga tidak dirasakan secara langsung. Sebaliknya dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor transportasi berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia dan memiliki hubungan

- dengan arah positif.
- d. Variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan dalam jangka pendek tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Begitu juga dalam jangka panjang variabel pengeluaran pemerintah sektor perumahan juga tidak berpengaruh secara signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Hal tersebut tidak sesuai dengan hipotesis yang dikembangkan World Bank (2004) yang mengemukakan bahwa rendahnya investasi dapat disebabkan oleh rendahnya ketersediaan infrastruktur khususnya perumahan sehingga integrasi ekonomi tidak terwujud dan pertumbuhan ekonomi terhambat.

Keterbatasan Penelitian

Keterbatasan dalam penelitian ini adalah banyaknya variabel yang tidak signifikan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia baik dalam jangka panjang maupun dalam jangka pendek. Variabel independen yang ada dalam penelitian ini tidak dapat langsung mempengaruhi variabel dependennya, sehingga diperlukan adanya variabel *moderating* dan variabel *intervening* untuk mengatasi masalah pengaruh tersebut. Variabel-variabel tersebut misalkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), angka kemiskinan, angka pertumbuhan pembangunan transportasi, angka pertumbuhan pengguna transportasi, dan indikator-indikator lain dalam sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Diharapkan penelitian selanjutnya mampu memperbaiki keterbatasan-keterbatasan dalam penelitian ini.

Saran

Sesuai dengan hasil penelitian yang didapat, maka diajukan beberapa saran sebagai berikut:

- a. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah sektor pendidikan dan pengeluaran pemerintah sektor transportasi mempengaruhi pertumbuhan ekonomi secara signifikan dalam jangka panjang. Untuk itu perlu diupayakan
- b. investasi besar termasuk melibatkan swasta dalam sektor transportasi dan pendidikan sehingga dapat membantu pemerintah untuk menyediakan jaringan transportasi dan pendidikan yang baik bagi masyarakat.
- c. Dalam jangka pendek, pengeluaran pemerintah sektor transportasi tidak

berpengaruh signifikan dan memiliki arah negatif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia. Percepatan pembangunan transportasi perlu ditingkatkan dengan melihat hubungan antar daerah sehingga pengeluaran untuk sektor transportasi akan memberikan pengaruh yang besar terhadap perekonomian daerah dan ketimpangan pembangunan akan berkurang.

- d. Hasil penelitian menunjukkan adanya pengaruh variabel lain sebesar 2,15 persen pada jangka panjang dan 62,57 persen pada jangka pendek. Maka dari itu, model pertumbuhan ekonomi Indonesia masih terbuka untuk dikembangkan dengan menambahkan variabel-variabel lain.
- e. Karena keterbatasan pemerintah dalam mengumpulkan penerimaan negara yang berdampak pada sempitnya ruang fiskal, diharapkan dalam pengalokasian anggaran tersebut pemerintah mempertimbangkan sektor-sektor mana yang menjadi prioritas dalam pertumbuhan ekonomi sehingga pengeluaran yang dilakukan pemerintah lebih terasa manfaatnya bagi pembangunan ekonomi dan pengelolaan anggaran menjadi lebih efektif dan efisien.

6. DAFTAR PUSTAKA (REFERENSI)

- Anand, Sudhir and Sen, Amartya. 2000. Human Development and Economic Sustainability. *World Development* Vol. 28, No. 12, pp. 2029-2049.
- Ariefianto, Moch. Doddy. 2012. *Ekonometrika Esensi dan Aplikasi dengan Menggunakan Eviews*. Jakarta: Erlangga.
- Arpaia, Alfonso, and Alessandro Turrini. Government expenditure and economic growth in the EU: long-run tendencies and short-term adjustment. Available at SSRN 2004461 (2007).
- Basri, A.F.M dan Rivai, V. 2005. *Performance Appraisal*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Bastias, Desi Dwi. 2010. *Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah sektor pendidikan, Kesehatan, dan Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Indonesia Periode 1969-2009*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- Bhakti, Nadia Ayu, Istiqomah dan Suprpto. 2014. *Ekuitas: Jurnal Ekonomi dan Keuangan*-Volume 18, no.4: 452-469.

- Boediono. 1992. *Ekonomi Makro. Edisi 4*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 1999. *Teori Pertumbuhan Ekonomi*. Yogyakarta: BPFE.
- Boediono. 2004. *Ekonomi Moneter edisi keempat*. Yogyakarta: BPFE
- Dumairy. 1997. *Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Erlangga.
- Dumairy. 2004. *Perekonomian Indonesia, Cetakan kelima*. Jakarta: Erlangga.
- Gujarati, Damodar dan Dawn Porter. 2007. *Dasar-dasar Ekonometrika Jilid 1*. Jakarta: Erlangga.
- Haryanto, Tri, Unggul H. dan Achmad Solihin. 2005. Pengeluaran Pemerintah dan Kinerja Sektor Pendidikan serta Kesehatan di Jawa Timur. *Majalah Ekonomi*, Tahun XIV No.2, 2 Agustus 2005. Surabaya: Fakultas Ekonomi Universitas Airlangga.
- Idris, Amiruddin. 2016. *Ekonomi Publik*. Yogyakarta: Deepublish.
- Jamzani, Sodik. 2007. Pengeluaran Pemerintah dan Pertumbuhan Ekonomi Regional: Studi Kasus Data Panel di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Pembangunan* Vol. 12. No 1, April 2007. Hal 27-36.
- Jhingan, M L. 2000. *Ekonomi Pembangunan dan Perencanaan*. Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada.
- Arsyad, Lincolyn. 2004. *Ekonomi Pembangunan*. Yogyakarta: Bagian Penerbitan. STIE YKPN.
- Mangkoesobroto, Guritno. 1994. *Kebijakan Publik Indonesia, Substansi dan Urgensi*. Jakarta: Gramedia Pustaka.
- Mills, A dan Gilson, L. 1990. *Ekonomi Kesehatan Untuk Negara-Negara Sedang Berkembang*. Jakarta: Depkes RI.
- Odhiambo, N. M. (2015). Government expenditure and economic growth in South Africa: An empirical investigation. *Atlantic Economic Journal*, 43(3), 393-406.
- Ranis, Gustav. 2004. Human Development and Economic Growth. Center Discussion Paper No. 887.
- Rodinelli, D. A. 1985. *Applied Methods of Regional Analysis, The Spatial Dimensions of Development Policy*. New York: Westview Press.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 1*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sekaran, Uma. 2006. *Metodologi Penelitian untuk Bisnis, Edisi 4, Buku 2*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sen, Amartya. 2000. Well-Being, Agency and Freedom: The Dewey Lectures 1984. *The Journal of Philosophy*, Vol. 82, No. 4 (Apr., 1985), 169-221
- Sugiyono. 2010. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Jakarta: Alfabeta
- Sukirno, Sadono. 2006. *Ekonomi Pembangunan. Edisi Ke 2*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Suparmoko. 1994. *Keuangan Negara Dalam Teori dan Praktik*. Yogyakarta: BPFE.
- Todaro, Michael P. dan Stephen C. Smith. 2006. *Pembangunan Ekonomi*. Jakarta: Erlangga.
- Todaro, Michael P. 1997. *Pembangunan Ekonomi Di Dunia Ketiga*. Edisi Ke Enam, Alih Bahasa: Drs. Haris Munandor, M. A. Jakarta: PT Gelora Aksara Pratama.
- Wahab, M. (2004). Economic growth and government expenditure: evidence from a new test specification. *Applied economics*, 36(19), 2125-2135.
- Widodo, Adi, Waridin dan Johanna Maria K. 2011. Analisis Pengaruh Pengeluaran Pemerintah di Sektor Pendidikan dan Kesehatan terhadap Pengentasan Kemiskinan Melalui Peningkatan Pembangunan Manusia di Jawa Tengah. *Jurnal Dinamika Ekonomi Pembangunan* Vol. 1, No 1. Hal 25-42.
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- Nota Keuangan dan APBN Tahun 1987 sampai dengan Tahun 2017.